

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu pembangunan daerah akan optimal jika potensi yang terdapat di wilayah tersebut dikelola secara baik oleh pihak yang berkepentingan dengan menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Pembangunan daerah tersebut sebagai pelaksanaan pembangunan nasional yang diarahkan mampu membangun dan menyelaraskan pertumbuhan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Desa merupakan bagian dari suatu wilayah yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan suatu daerah. (Kirana & Artisa, 2020). Dalam hal ini, desa berkontribusi untuk mengoptimalkan potensinya dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat desa. Dengan mengeksplorasi potensi desa yang dimiliki dengan tujuan untuk membangun dan memajukan desa, masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satu potensi yang dikembangkan di beberapa daerah yaitu pariwisata.

Sektor pariwisata yang ada di Indonesia merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam keberlangsungan perekonomian (Alamsyah et al., 2019). Dalam hal ini, pariwisata berperan aktif sebagai alat untuk melestarikan kebudayaan dan memperkenalkan budaya dari daerah tersebut. Pengembangan dan pemberdayagunaan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan kawasan wisata tersebut menjadi lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan (Tongkotow et al., 2021).

Pariwisata juga sebagai sumber nilai yang strategis yang berasal dari potensi budaya lokal yang dikembangkan menjadi kegiatan kepariwisataan (Agustine & Dwinugraha, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata. Salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan yaitu Desa wisata. Desa wisata merupakan suatu desa yang mempunyai karakteristik atau ciri khas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi destinasi wisata. Terdapat keunikan objek wisata yang bisa dinikmati yaitu wisata alam, budaya masyarakat dan tradisi yang masih dianut, makanan khas, lingkungan yang asri dan alami serta adat istiadat.

Namun seperti diketahui bersama, sejak awal tahun 2020 adanya permasalahan sosial yang serius yaitu munculnya pandemi Covid-19 yang mana melanda semua negara termasuk di Indonesia. Kasus pandemi Covid-19 sangat berdampak pada bidang ekonomi sosial di Indonesia khususnya sektor pariwisata. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan wisatawan yang cukup signifikan. Kondisi pariwisata yang kurang kondusif membuat kondisi keuangan masyarakat terpuruk (Utami, Nadya Rechta et al., 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan desa wisata dan sektor pariwisata mengalami kondisi krisis dengan tidak dapat berkembang, oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk meminimalkan resiko dengan memulihkan kondisi layanan wisata yang ada. Kemajuan pengembangan desa wisata untuk kedepannya akan mempercepat proses

dalam pemulihan peningkatan ekonomi daerah saat masa pandemi Covid-19 (Agustine & Dwinugraha, 2021).

Salah satu daerah yang terdampak covid-19 adalah Provinsi Yogyakarta, dimana daerah ini memiliki potensi pariwisata yang unggul dan sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tak dipungkiri pandemi ini membuat banyak pariwisata di Yogyakarta mengalami penurunan, banyak desa wisata di berbagai daerah yang terdampak. Sebagaimana diketahui daerah di Kabupaten Sleman merupakan salah satu kota yang menjadi pilihan menarik bagi wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang berupaya mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan. Banyaknya desa wisata di Kabupaten Sleman, yang menjadikan Kabupaten Sleman dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak desa wisata (Rohani & Irdana, 2021). Salah satu desa wisata yang berkembang dengan baik yaitu Desa Wisata Pulesari yang berlokasi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Pulesari merupakan sebuah desa wisata yang didirikan sendiri oleh masyarakat sehingga disebut juga sebagai desa wisata mandiri. Desa ini menyajikan keindahan alam dan budaya tradisi. Desa wisata ini didirikan dengan tujuan untuk memperdayakan SDM dan SDA yang ada sehingga menarik wisatawan serta diakui dan dikenal oleh masyarakat.

Selain itu, Desa Wisata Pulesari juga menyediakan objek wisata yang berbeda dari desa wisata lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Pencapaian Desa Wisata Pulesari di atas tentu didapatkan melalui peran dan kerjasama dari beberapa pihak dalam hal ini masyarakat Desa Wisata Pulesari dan pemerintah Desa

Wonokerto. Bentuk kerjasama berupa kolaborasi antara Pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Desa Wisata Pulesari.

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia No. 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional pada Tahun 2010-2025 bahwa kelembagaan kepariwisataan merupakan kesatuan unsur beserta jaringannya dikembangkan secara terorganisir antara lain pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional yang berkesinambungan untuk menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Maka sebab itu, perlu adanya sebuah kolaborasi kerjasama yang disebut juga collaborative governance antara pemerintah yang terkait khususnya dinas kebudayaan dan pariwisata di daerah tersebut dengan masyarakat setempat untuk memperbanyak program berbasis sumber daya alam dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena hal tersebut adalah strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan keunikan daerah dan menjadi persaingan dengan daerah yang lain.

Collaborative governance sangat penting dalam kerjasama karena untuk mengoptimalkan pembangunan, mengingat dalam pengembangan objek wisata harus bersifat berkelanjutan, sehingga berdampak baik untuk pengembangannya. Dengan adanya konsep dalam pengembangan diharapkan akan meningkatkan kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Konsep kolaborasi ini dilakukan guna mengembangkan pelestarian kebudayaan yang bertujuan untuk menjaga kearifan lokal yang diimplementasikan dan diciptakan untuk kemajuan komunitas yang mengembangkannya.

Pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pihak swasta atau masyarakat turut serta dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, aktor-aktor kebijakan dalam kerjasama atau collaborative governance dapat secara konstruktif mengisi kekurangan dan kelebihan pada proses implementasi kebijakan. Dalam membangun Desa wisata Pulesari diperlukan partisipasi dari sejumlah pihak agar dapat bersama-sama membangun kampung sebagai destinasi wisata di desa Wonokerto. Diperlukan kolaborasi diantara para stakeholder terkait dalam mewujudkan desa wisata yang maju. Tujuannya agar ada keseimbangan sumber daya diantara para stakeholder atau aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa wisata Pulesari.

Dalam permasalahan pandemi Covid-19 ini menjadikan tantangan bagi pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan stakeholder. Sehingga perlu adanya strategi pengembangan pariwisata secara efektif atau kebijakan yang tepat agar dapat diterapkan dalam menjalankan kegiatan wisata di masa pandemi covid-19 sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pengelolaan desa wisata ini murni kewenangan desa karena sifatnya yang mandiri. Karena dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman selama ini berdasarkan dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang mana selaku pengelola. Oleh karena itu maju atau tidaknya tergantung dari masyarakat itu sendiri.

Tentu di Kabupaten Sleman terdapat banyak desa wisata yang mempunyai ciri khas masing-masing dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk promosi agar desa wisata mereka mendatangkan banyak wisatawan dan juga tertarik dengan desa wisata mereka. Dibandingkan dengan desa wisata lainnya, Desa Wisata Pulesari

lebih banyak memiliki keunikan dan fasilitas yang unggul. Desa Wisata Pulesari secara umum mempunyai potensi utama yaitu wisata alam dan wisata budaya sebagai wisata pendukung. Selain itu dengan melestarikan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat di Pulesari, dapat menjadi obyek wisata pendukung dengan menjual tradisi dan budaya yang ada sebagai paket wisata.

Pengembangan desa wisata adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat serta swasta dalam memajukan desa dengan adanya pariwisata pada daerah desa setempat. Dalam hal ini, pengelolaan Desa Wisata Pulesari dilakukan oleh beberapa stakeholders antara lain pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat desa Pulesari. Munculnya masa pandemi Covid-19 mendorong desa wisata Pulesari ini untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan dan diperlukan peran aktif masyarakat lokal dalam memperbaiki mutu sumberdaya manusia, produk yang ditawarkan, serta pengaturan dan pengelolaan manajemen desa wisata kedepannya. Sehingga kesejahteraan masyarakat daerah pada tatanan melestarikan alam dan nilai – nilai sosial budaya dapat ditingkatkan. Selaras dengan itu, maka perlu adanya collaborative governance dalam mengembangkan Desa Wisata Pulesari. Hal tersebut penting agar menjadi contoh dan motivasi desa wisata lain untuk maju. Keberhasilan yang diperoleh oleh Desa Wisata Pulesari sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang baik dari para aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Berdasarkan capaian tersebut, peneliti mengangkat judul “Collaborative Governance dalam Mengembangkan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman pasca pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Siapa saja aktor yang terlibat collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata Pulesari pasca pandemi covid-19?
2. Bagaimana proses dalam collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata Pulesari pasca pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa rumusan masalah yang nantinya dapat diketahui tujuan penelitian ini dilakukan diantaranya:

1. Untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata Pulesari pasca pandemi covid-19.
2. Untuk menjelaskan proses collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata Pulesari pasca pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menyelesaikan penelitian dengan sebaik mungkin yang diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam mengembangkan pemikiran dan wawasan ilmu yang luas yang berada di lingkup Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau

referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji fenomena yang sejenis di tempat lain yang tentunya berkaitan dengan collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata pasca pandemi. Selain itu bisa menjadikan sumber pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa, masyarakat, dan elemen lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagaimana pelaksanaan collaborative governance dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat menjadi evaluasi maupun solusi dalam pembuatan kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi penelitian yang akan meneliti hal yang serupa, melihat desa wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup banyak. Selain itu juga dapat menjadi bahan bacaan dan wawasan bagi seluruh masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Dalam sebuah penelitian diperlukan tinjauan penelitian terdahulu supaya dapat memberikan gambaran serta pertimbangan dalam referensi topik yang akan diteliti. Maka peneliti akan mencoba menjabarkan sebagai berikut:

Dari penulisan (Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, 2016) yang berjudul "*Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan)*", dan penelitian yang dilakukan (Krisnawati, 2021) dengan judul "*Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya*", selanjutnya jurnal (Sanjaya et al., 2020) yang berjudul "*Optimalisasi Kesiapan Desa Kersik Menuju Desa Wisata Pascapandemi Covid-19*", selanjutnya penelitian (Amir et al., 2020) berjudul "*Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat*", selanjutnya (Mulyadi & Rahayu, 2022) dengan judul "*Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Bermi*". Kelima jurnal diatas membahas terkait bagaimana mengembangkan potensi desa wisata yang bisa dikembangkan di desa Sukobendu dalam kondisi covid-19, bagaimana mengetahui kelayakan suatu desa yang berpotensi menjadi desa wisata pasca covid-19, meningkatnya pemahaman sadar wisata dan pentingnya desa Kersik menjadi Desa Wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa pasca covid-19, diperlukan strategi penguatan untuk masyarakat selaku pengelola dalam mengembangkan desa wisata, bagaimana keinginan pemerintah desa bersama masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kelima jurnal tersebut berfokus hanya pada bagaimana

strategi dalam pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi desa yang ada. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata pasca covid-19.

Penelitian yang dilakukan (Syah, 2017) "*Strategi Mengembangkan Desa Wisata*", selanjutnya penelitian (Ginting, 2019) berjudul "*Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*", selanjutnya jurnal (Zaenuri, 2012) berjudul "*Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance*", Penelitian (Kurniawan et al., 2022) yang berjudul "*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang*", penelitian yang dilakukan oleh (Molla et al., 2021) dengan judulnya "*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat*". Dari kelima jurnal tersebut membahas terkait adanya desa wisata diperlukan strategi untuk mengembangkannya yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju, bagaimana konsep kerjasama yang dilakukan antar pihak dalam pengembangan sektor pariwisata, bagaimana pengelolaan pariwisata pasca bencana ternyata harus perlu ada penanganan khusus, menggunakan paradigma kolaboratif governance, bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh melalui konsep desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder, bagaimana pengelolaan kampung

wisata yang belum berjalan secara efektif karena beberapa faktor. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berfokus pada aktor yang terlibat dan bagaimana keterlibatan aktor tersebut dalam collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata pulesari pasca covid-19.

Hasil penelitian (Imron & Anwar, 2019) yang berjudul “*Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasidi Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang*”, selanjutnya jurnal (Deniar, 2021) dengan judul “*Collaborative Governance dalam Program Desa Percontohan Saemaul Undong di Provinsi Yogyakarta, Indonesia*”, menurut penelitian yang dilakukan (Sururi, 2018) berjudul “*Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)*”, selanjutnya (Kirana & Artisa, 2020) dengan judul “*Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu*”, jurnal dari (Yasintha, 2020) yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar*”. Dari kelima jurnal tersebut membahas bagaimana mencari strategi yang ideal bagi kolaborasi pengembangan wisata berbasis edukasi, kolaborasi antara pihak terlibat dalam menjalankan upaya melalui pembangunan pemberdayaan desa, bagaimana inovasi kebijakan Collaborative Governance revitalisasi kawasan cagar budaya Banten Lama memiliki nilai faktor dan dampak strategis, adanya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah daerah dengan berbagai pihak lainnya. Terdapat dua jurnal yang memiliki persamaan dalam fokus penelitian dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu siapa saja aktor yang terlibat dalam collaborative governance dalam

mengembangkan desa wisata dengan memiliki kontribusi dan peran dari masing-masing aktor.

Dari beberapa penelitian yang sudah banyak mengangkat Desa Wisata Pulesari, perlu adanya perbandingan yang harus di selaraskan agar mampu meningkatkan kembali kualitas dari penulisan yang ada. Dari tulisan yang di buat oleh beberapa penulis terdapat berbagai kelebihan yang mampu dijadikan sebagai bahan acuan terhadap penelitian. Dari penelitian (Suwarjo, 2021) yang berjudul *“Analisis Swot Dalam Pengembangan Desa Wisata Pulesari Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”*, selanjutnya jurnal (Wijayanti, 2022) berjudul *“Manajemen Komunikasi Krisis Desa Wisata Pulesari dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”*, serta jurnal (Sari & Kustulasari, 2020) dengan judul *“Analisis Network Learning dalam Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Wisata Pulesari”*. Dimana ketiga jurnal ini membahas pengembangan Desa Wisata Pulesari berbasis SWOT sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan strategis yang tepat dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari, bagaimana suatu manajemen komunikasi yang dilakukan pengelola desa wisata pulesari dengan mengembangkan strategi, Desa Wisata Pulesari tidak mengalami network learning, tetapi terdapat pembelajaran di level organisasi di dalam jejaring tersebut. Sehingga Desa Wisata Pulesari mendapatkan pembelajaran tanpa mempengaruhi hubungan dalam berjejaring. Dari ketiga jurnal ini kurang mengambil lebih dalam sisi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di desa wisata pulesari. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini akan membahas berbagai urusan yang menyangkut dengan pemangku kepentingan kebijakan dalam mencapai konsep collaborative

governance di desa wisata pulesari. Ditambah lagi dalam tiga judul ini jarang menyangkut pautkan aktor-aktor yang membahas keterlibatan aktor dalam mengembangkan desa wisata pulesari pasca covid-19.

Berdasarkan penelitian-penelitian pada kajian tinjauan pustaka terdahulu yang sudah dipaparkan diatas saling berkaitan dengan topik dalam penelitian ini mengenai kolaborasi pemerintah dalam pengembangan desa wisata. Penelitian saat ini dengan judul “Collaborative Governance dalam mengembangkan Desa Wisata Pulesari, Turi, Sleman Pasca Pandemi Covid-19” memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian ini akan membahas mengenai keterlibatan aktor dan proses collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata pulesari pasca pandemi covid-19. Yang mana akan memunculkan konsep kerjasama yang dilakukan antar aktor-aktor yang terlibat guna mendapatkan strategi atau program yang ideal dalam mengembangkan desa wisata pulesari. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat memperkaya wawasan dalam menunjang penelitian-penelitian yang selaras kedepannya.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Ada dua sudut pandang mengenai governance yaitu dari sudut pandang deskriptif dan perspektif (Chandoke dalam Shylendra, 2007: 217) dalam (Arrozaaq, 2016). Jika dilihat dari sudut pandang deskriptif, paradigma Governance merupakan sebuah fenomena yang muncul di negara maju dan berkembang untuk merespon keterbatasan peran yang dimiliki oleh pemerintah. Di negara maju,

konsep welfare state telah memudar dikarenakan munculnya ideologi neo liberal. Adanya globalisasi menyebabkan perubahan itu menular hingga ke negara berkembang lainnya. Sehingga adanya tekanan bagi pemerintah dalam melibatkan aktor lain untuk program pembangunan. Oleh karena itu, negara-negara di dunia menjadi lebih plural dengan kehadiran berbagai aktor lain dalam program pembangunan dari tingkat lokal sampai tingkat global. Keterlibatan aktor-aktor tersebut berupaya untuk melengkapi peran yang sudah dilakukan pemerintah, bahkan juga ada yang menggantikan peran pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan. Di dalam paradigma governance, terdapat tiga aktor (*Governance, Private Sector, Civil Society*) yang mempunyai peran dalam pembangunan. Pemerintah mulai mengikutsertakan aktor lain yaitu aktor non pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani) dalam program pembangunan. Kapasitas dari ketiganya sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi kapasitas masing-masing aktor lainnya.

Secara filosofis, kolaborasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 8), kolaborasi yaitu upaya dalam penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu ataupun organisasi yang saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas guna mencapai tujuan bersama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Leever (2010) menyatakan bahwa kolaborasi merupakan konsep yang digunakan dalam menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran dari masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut

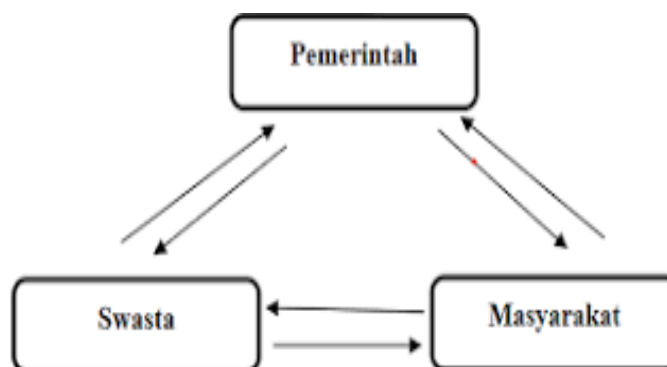
mencoba untuk mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Dapat disimpulkan dari dua definisi tersebut, bahwa kolaborasi merupakan solusi atas keterbatasan yang dialami oleh individu maupun organisasi.

Konsep collaborative governance menjadi upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, sehingga menekankan interdependensi antara pemerintah dengan stakeholder lain diluar pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat kompleks dan dinamis, sehingga akan sangat tidak mungkin apabila hanya diselesaikan oleh satu organisasi semata yakni pemerintah, melainkan perlu adanya sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya (Akbar et al., 2022).

Menurut Charalabidiset, collaborative governance muncul di masa paradigma governance dimana pada saat itu masyarakat mengalami perkembangan sehingga pemerintah menghadapi masalah yang kompleks. Disisi lain pemerintah juga mempunyai keterbatasan waktu untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor eksternal (Arrozaaq, 2016). Dengan adanya collaborative governance memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan dari berbagai pihak atau instansi terhadap persoalan yang dapat dibawa ke dalam bentuk collaborative governance yang bervariasi antara lain: komunikasi, management, keterlibatan wakil rakyat, regulasi, negosiasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program maupun kebijakan (Putra, 2018).

Dalam kutipan tulisan ini, teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash digunakan sebagai dasar landasan dimana teori tersebut menyatakan bahwa “ *a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non – state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (Ansell & Gash, 2008). Dapat diartikan collaborative governance merupakan model pengendalian yang dimana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan para stakeholders non state maupun para pemangku kepentingan yang diluar lembaga publik dalam proses pengambilan kebijakan yang bersifat konsensus, formal dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program publik (Molla et al., 2021).

Hubungan antara aktor tidak satu arah saja, tetapi juga terdapat timbal balik. Adapun model kerjasama dan komunikasi para aktor dalam collaborative governance dapat dilihat pada bagan berikut ini:



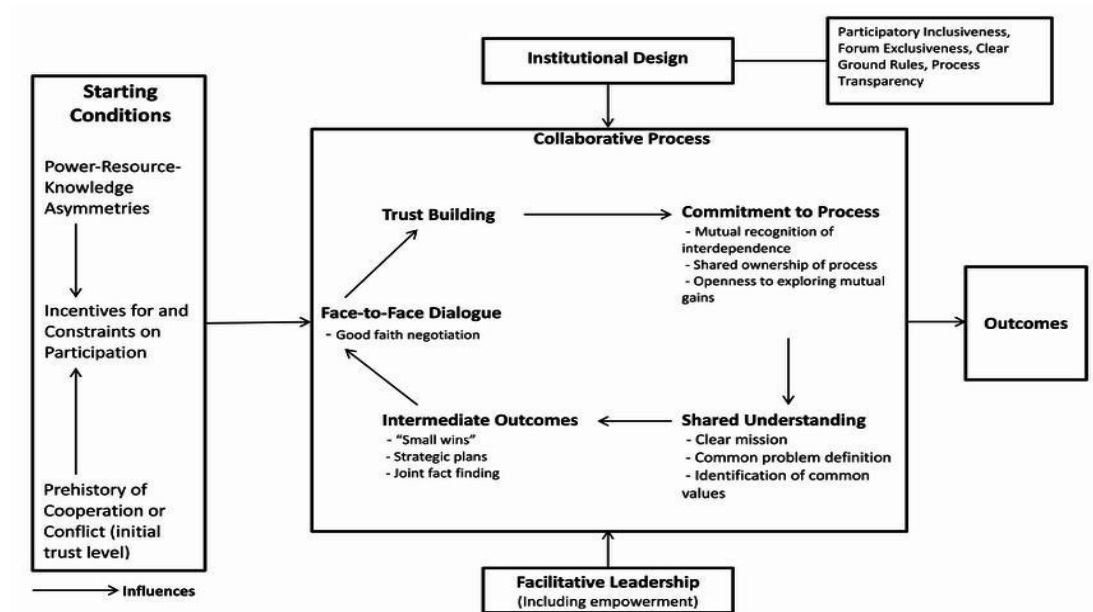
Sumber: Abidin dkk 2013

Terdapat tiga dimensi yang terdapat di dalam collaborative governance. Dimensi pertama yaitu pencapaian target klien ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya yang dapat memajukan pelayanan. Dimensi kedua adalah hubungan antar organisasi yang ditingkatkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat potensi dan kolektif kolaborasi organisasi. Apabila kolaborasi dijalankan dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang berupa peningkatan modal sosial masyarakat yang dilayani. Dalam hubungan antar organisasi yang baik dapat memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah yang ada dan akan memberikan jalan untuk hubungan masa depan yang lebih baik. Yang terakhir dimensi ketiga yaitu pengembangan organisasi memberikan keuntungan besar secara langsung. Jika dengan adanya kolaborasi dapat meningkatkan pengembangan organisasi, sehingga dapat membantu untuk mencapai tujuan serta meningkatkan kapasitas dalam bersaing (Bila & Saputra, 2019).

Collaborative Governance merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik. Peran aktor yang ikut terlibat diantaranya yaitu dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan media (Kirana & Artisa, 2020). Kolaborasi ini sangatlah penting karena memang dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan perlu adanya

anggaran yang tidak sedikit maka dari terciptalah kolaborasi ini yang mana dapat memudahkan.

1.1 Gambar Bagan Collaborative Governance Menurut (Ansell & Gash, 2008)



Didalam collaborative governance terdapat sebuah proses untuk menggambarkan tahapan pengembangan kolaborasi. Menurut Ansell & Gash. proses collaborative governance terdiri dari face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome. Untuk lebih jelasnya proses collaborative governance akan dijelaskan dibawah ini:

1. Face to face dialogue

Dialog tatap muka merupakan tahap awal yang diperlukan untuk dialog secara langsung diantara para stakeholder yang terlibat. Dialog langsung sebagai media Komunikasi diperlukan bagi stakeholder untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan, dan keuntungan bersama

yang ingin dicapai. Inti dari tahap ini adalah membangun komunikasi diantara para stakeholder.

2. Trust Building

Pada tahap membangun kepercayaan antar para stakeholders ditengan ketebatasan dan perbedaan kepentingan harus dilakukan dari masing-masing stakeholder tersebut. Inisiator kolaborasi wajib harus membangun kepercayaan di tengah krisis dan kuatnya kepercayaan.

3. Commitment to process

Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kemauan di muka untuk mematuhi dan menerima hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus menerima arah yang tidak didukung sepenuhnya oleh sang stakeholder. Komitmen bergantung atas kepercayaan bahwa stakeholder lain akan menghormati perspektif dan kepentingan Anda.

4. Shared understanding

Dalam menyatukan persepsi terhadap substansi dan tujuan kolaborasi diperlukan shared understanding atau pemahaman bersama. Beberapa istilah mengenai pemahaman bersama yaitu misi bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas, atau arah yang jelas. Artinya pemahaman bersama menyiratkan kesepakatan pada definisi masalah atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

5. Intermediate outcome

Tahap ini merupakan output sebagai hasil dari proses kolaborasi. Dalam tahap ini diperlukan pencapaian minimal sebagai hasil pada saat mengembangkan suatu kesempatan yang mampu membimbing agar dapat tercapai keberhasilan dari proses kolaborasi yang dilakukan. Intermediate Outcome atau hasil ini bertujuan untuk memberikan keuntungan dari kolaborasi.

1.6.2 Konsep Desa Wisata

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata; desa wisata ialah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi/kultur yang berlaku. Desa wisata juga merupakan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata. Salah satu cara menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat desa wisata (Akbar et al., 2022).

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan perekonomian yang unik dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai komponen kepariwisataan, seperti atraksi, kebutuhan wisata, serta cinderamata. Pada desa wisata biasanya berupa wilayah pedesaan yang mempunyai beberapa karakteristik

yang layak menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan tersebut, penduduknya masih memiliki budaya dan tradisi yang relatif masih asli. Selain itu juga terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya makanan khas, kegiatan pertanian dan sistem sosial menambah suasana di kawasan desa wisata itu. Di luar faktor tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga keasriannya menjadi faktor penting dari kawasan desa wisata.

Dalam mengembangkan Desa Wisata diperlukan kajian sehingga dampaknya dapat dikontrol, pengkajian dilakukan dengan cara memperhatikan faktor daya dukung dan keberlangsungan. Selain itu menimbang apakah desa tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa baik secara langsung dan tidak. Maka, dalam pengembangan desa wisata penting untuk memberdayakan masyarakatnya (Astuti et al., 2020).

Upaya untuk mewujudkan desa wisata, dalam praktiknya membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi ketika suatu desa ingin menjadikannya desa sebagai desa wisata. Hal ini, sejalan dengan pandangan Hadiwijoyo yang memaparkan bahwa suatu desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi desa wisata, sebagai berikut:

- a) Aksesibilitas yang baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi.
- b) Memiliki objek-objek wisata alam, seni budaya, makanan lokal, legenda dan objek-objek lain yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
- c) Mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa.

- d) Keamanan desa yang terjamin.
- e) Tersedianya akomodasi, telekomunikasi dan tenaga yang memadai.
- f) Beriklim sejuk atau dingin.
- g) Berhubungan dengan objek wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Pada dasarnya bentuk pengelolaan desa wisata yaitu dari masyarakat yang dikelola dengan benar serta mempertimbangkan beberapa aspek penting di dalam pengelolaan diantaranya; (1) Aspek keuangan, (2) Aspek sumber daya manusia, (3) Aspek pengelolaan, (4) Aspek material serta (5) Aspek pasar. Dalam satu forum organisasi masyarakat yang berupa kemitraan, yayasan, manajemen korporasi dan badan pengelolaan desa wisata yang unsur-unsur dalam pengelolaannya diambil dari kemampuan masyarakat setempat. Serta mendahulukan peran para pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan desa wisata (Sastrayuda, 2010).

Desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata apabila memenuhi beberapa kriteria (Dinas Pariwisata DIY, 2014) sebagai berikut:

1. Memiliki Potensi yang khas dan unik sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan, karena hal tersebut menjadi modal dalam mengembangkan kawasan menjadi sebuah desa wisata. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi:

- a. Lingkungan alam seperti, persawahan, perbukitan, bentang alam, bentuk penataan pedesaan maupun arsitektur bangunan yang mempunyai ciri khas atau keunikan, dan lain-lain).
 - b. Kehidupan sosial budaya masyarakat setempat seperti, tradisi budaya, adat istiadat, kesenian dan kerajinan tradisional, pola hidup masyarakat yang unik dan khas, dan lain-lain).
2. Komitmen dari masyarakat untuk menerima dan terbuka dalam semua bentuk kegiatan pariwisata di desanya sehingga dapat terbentuk interaksi antara masyarakat dengan wisatawan untuk saling menghormati, menghargai dan saling memberi manfaat satu sama lain. Manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat yaitu dalam bentuk penghargaan pelestarian budaya setempat dan manfaat ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Sedangkan bagi pengunjung wisatawan yaitu menambah wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Sehingga dibutuhkan semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat untuk menjaga karakter yang khas dari lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan budaya dalam masyarakat setempat. Adanya komitmen dan motivasi sangat penting karena akan menjamin kelangsungan daya tarik dan kelestarian sumber daya wisata atau potensi yang dimiliki desa tersebut. Oleh karena itu, kelembagaan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan pengembangan desa wisata.

3. Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan pengelolaan desa wisata. hal tersebut sangat penting karena pengembangan desa wisata yang dimaksudkan yaitu untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan produktifitas secara ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat pedesaan melalui bidang yang dimiliki. Dengan demikian terdapat dampak positif pada pengembangan pariwisata di desa yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Sebuah desa wisata dikatakan siap apabila dapat membangun jejaring dengan stakeholders terkait industri pariwisata dan mempromosikan desa wisata agar dikenal secara luas.
4. Terdapat fasilitas untuk mengembangkan dan mendukung berlangsungnya kegiatan wisata, seperti: homestay, pelayanan umum, sanggar kesenian dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai desa wisata, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pengelolaan desa wisata merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat setempat serta swasta dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata pada saerah desa wisata. Dalam hal ini, pengembangan Desa Wisata Pulesari melibatkan oleh beberapa aktor diantaranya adalah pemerintah Desa Wonokerto, Masyarakat, dan lain-lainnya.

1.6.3 Konsep Pasca Pandemi

Pasca Pandemi merupakan kondisi dimana telah terjadinya suatu wabah yang sangat merugikan di berbagai bidang. Sehingga dibutuhkan solusi atau cara untuk memulihkan kembali kejadian tersebut dengan keadaan yang lebih baik (Harsono, 2021).

1.7 Definisi Konseptual

1.1.1 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Namun dalam penyelesaian masalah tersebut pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah atau stakeholders seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya tujuan yang sama.

1.1.2 Desa Wisata

Desa Wisata merupakan Desa yang memiliki potensi yang dapat dijadikan tempat wisata atau destinasi pariwisata karena daya tarik yang dimilikinya. Dengan cara memanfaatkan daya tarik wisata alam dan budaya, tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa setempat, layanan fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang tersedia.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Identifikasi Aktor yang terlibat.	Pemerintah	- Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. - Pemerintah Kalurahan Wonokerto
		Masyarakat	- Pengelola Desa Wisata Pulesari - Pokdarwis - Masyarakat di sekitar Desa Wisata Pulesari.
		Akademisi	- UPN - ISI - UIN - UNY - Atmajaya.
		Media	-Media Sosial
2.	Proses Collaborative Governance.	<i>Face to face dialoge</i> (dialog tatap muka)	- Pertemuan Forum Musyawarah
		<i>Trust Building</i> (membangun kepercayaan)	- Menerapkan Transparansi - Kesepakatan Kerjasama
		<i>Commitment to process</i> (Komitmen terhadap proses)	- saling ketergantungan.
		<i>Share Understanding</i> (pemahaman bersama)	- Visi dan Misi yang jelas.
		<i>Intermediate outcomes</i> (hasil dari proses)	- Rencana strategi. - Hasil dari proses kolaboratif.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan dengan studi kasus yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada

collaborative governance dalam mengembangkan Desa Wisata Pulesari. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang berupa prosedur pemecahan masalah yang sedikit dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sehingga akan dideskripsifkan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi antara nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisis dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas.

Menurut (Sukmadinata, 2009) yang dikutip dalam (Suranto, 2020) dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh informasi tentang collaborative governance dalam mengembangkan desa wisata Pulesari. Selain itu, analisis deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara ada adanya. Alasannya yaitu karena metode penelitian ini lebih mudah jika dihadapkan pada kondisi yang ada di lapangan, serta menyajikan secara langsung hubungan peneliti dan narasumber.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan tempat yang menjadi situasi sosial tersebut akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Pulesari di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Isimewa Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dengan alasan melihat Desa Wisata Pulesari dalam mengembangkan potensi desa tersebut demi kemajuan desa.

1.9.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian tentunya penting untuk memiliki data yang akurat agar dapat memberikan informasi yang jelas terhadap sesuatu yang diteliti. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data untuk mendukung penelitian.

1.9.3.1 Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang mana semua informasi mengenai konsep penelitian dan seluruh hal yang terkait didalamnya yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara maupun observasi pada narasumber atau informan objek dan lokasi penelitian. Salah satunya dengan cara wawancara dengan beberapa pihak, seperti Lurah Wonokerto, Pengelola Desa Wisata Pulesari, Pokdarwis. Hal ini ditujukan agar dalam mendapatkan data dapat asli dan lebih rinci.

1.9.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk mendukung dalam penulisan pada penelitian ini. Berupa dokumen maupun catatan yang ada dan tulisan-tulisan karya ilmiah dari media atau arsip resmi. Karena data ini dapat mendukung kelengkapan dari data primer sesuai dengan judul penelitian dari penulis.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yakni:

1.9.4.1 Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan serta memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Dalam observasi ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang sulit didapatkan pada metode lain.

1.9.4.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Peneliti menyiapkan pertanyaan dari inti permasalahan yang akan ditanyakan dengan mengembangkannya sesuai respon dari narasumber. Tujuan dari wawancara secara mendalam yaitu untuk memperoleh data

secara langsung dan detail dari narasumber. Kemudian agar menghindari kelupaan informasi, peneliti akan meminta ijin kepada narasumber untuk menggunakan alat bantu seperti *handphone*. Berikut beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti pada saat melakukan wawancara:

Tabel 1.2 Daftar Narasumber Wawancara

No	Narasumber
1.	Lurah Wonokerto
2.	Pengelola Desa Wisata Pulesari
3.	Pokdarwis
4	Masyarakat dan Pengurus Desa Wisata Pulesari

1.9.4.3 Dokumentasi

Data dokumentasi diperoleh melalui dokumen kegiatan, dan foto yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data sebagai bukti nyata dan menambah pengetahuan selama melakukan penelitian. Hasil observasi serta wawancara akan lebih di percaya jika di dukung dengan bukti dokumentasi.

1.9.5 Unit Analisis Data Kualitatif

Unit analisa data merupakan bagain dari isi yang akan diteliti lebih dalam yang kemudian disederhanakan. Dengan kata lain, unit analisa data ini merupakan subjek yang akan dianalisis dalam penelitian. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Wonokerto, Pengelola Desa Wisata Pulesari,

Masyarakat. Karena hal ini untuk mengetahui bagaimana keterlibatan aktor tersebut terhadap pariwisata serta melihat peran Pemerintah Desa Wonokerto itu sendiri.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mencari dan menata data secara sistematis untuk menambah pemahaman peneliti terkait topik penelitiannya serta menyajikan data sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mencakup hasil wawancara yang meliputi: reduksi data, triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat menarik kesimpulan dan verifikasi berikut ini adalah teknik analisi data yang digunakan oleh peneliti:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data ini dimana peneliti memasukkan data yang telah diperoleh berupa narasi atau kata-kata yang didapatkan dari sumber data serta informasi selanjutnya nanti digabungkan menjadi satu dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah analisis yang memperjelas, memilih serta menyederhanakan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Sehingga nantinya data tersebut di reduksi guna menghasilkan informasi yang jelas dan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu uraian singkat atau bagan atau dalam bentuk uraian naratif. Hal tersebut relatif lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan mengetahui langkah apa yang harus dikerjakan selanjutnya sesuai dengan yang telah dipahami sebelumnya

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam menyajikan data, dimana isinya dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Serta peneliti juga dapat menambahkan saran dan rekomendasi pada temuannya terhadap pihak-pihak terkait sesuai dengan topik penelitian, jika memang dirasa diperlukan. Pemeriksaan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan kevalidan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data serta nantinya memerlukan pengecekan sebagai data pendamping data tersebut.